

Dampak Accrual Basic dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Mujannah¹, Safriansyah^{2*}, Iqbal Firdausi³, Siti Fatimah⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin

mujannah@stiei-kayutangi-bjm.ac.id, safriansyah@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

iqbal@stiei-kayutangi-bjm.ac.id, sitifatimah2402@icloud.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 29 Juni 2022

Disetujui : 5 Juli 2022

Dipublikasi : 5 Juli 2022

ABSTRACT

Researchers tested whether the application of accrual-based government accounting standards (SAP) as a form of GCG was able to improve the performance of government agencies KESBANGPOL through accrual-based SAP variables and a good internal control system was expected to be able to realize good governance. This study uses nine variables. Researchers distributed questionnaires to 47 employees of Kesbangpol Banjarmasin and tested the data through multiple regression analysis. The results showed that the accrual-based SAP implementation variables had an effect, and human resources, risk management, and supervision had a positive effect on AKIP. Variables of organizational commitment, information technology, control environment, control activities, information, and communication do not affect AKIP.

Keywords: *Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) and Government Internal Control System (SPIP) on Government Agencies Performance Accountability (AKIP).*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan pemerintahan daerah yang berkualitas, akurat, tepat, lengkap, dan relevan baik dipemerintahan kota atau daerah maupun provinsi diwajibkan harus adanya data laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran dan wajib audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, laporan keuangan yang berbasis akrual mampu mewujudkan *good governance* meningkatkan kinerja pemerintah, memfasilitas manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya, dan meningkatkan kinerja pelaporan keuangan. Laporan keuangan sebelumnya menerapkan basis kas, namun dengan terbitnya peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pemerintah mulai menerapkan basis kas menuju akrual. Ada empat unsur dalam Standar Akuntansi Pemerintah Akrual Basis (SAP) agar terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang (*good governance*), yaitu: penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, komitmen organisasi, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.

Standar Akuntansi Pemerintah mengharuskan pemerintah mengacu pada SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. SAP ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas. Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan pedoman untuk

menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sehingga wajib menyajikan laporan keuangan sesuai SAP. Penggunaan laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP dan eksternal auditor akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Khusus untuk pemerintah daerah, keuangan negara, tentang perbendaharaan negara, (Undang-Undang Nomor 17 , 2003) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , dan tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah , Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

"Komitmen organisasi sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Salah satu faktor yang memengaruhi penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia.

Menurut (Jantong, Nurkholis , & Roekhudin, 2018) suatu tantangan yang memengaruhi keberhasilan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan andal di bidang akuntansi, oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintah.

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Demi mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) maka pemerintah membentuk suatu sistem agar dapat mengendalikan seuruh kegiatan pemerintah, sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ada lima unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah yaitu: lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan (pengawasan).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan yaitu pengendalian intern dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak, serta dalam penatausahaan aset tetap. Pengendalian internal mempunyai peran penting sebagai pendeteksi jika terjadi suatu kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan (Arens, 2011).

Lingkungan Pengendalian menurut COSO dalam (Arens, 2011) menjelaskan bahwa terdapat enam faktor yang terdapat dalam *control environment* yakni: integritas dan nilai-nilai etika komitmen terhadap kompetensi dewan direksi dan komite audit), filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, penugasan wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia dan praktek.

Penilaian risiko menurut (Arens, 2011) akan menilai sejauh mana dampak dari suatu kejadian dapat mengganggu pencapaian dari tujuan perusahaan. Perusahaan harus dapat mengelola risiko yang dihadapinya. Perusahaan dapat mengelola dan melakukan penilaian terhadap risiko perusahaan, menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko tersebut dengan baik.

Kegiatan (aktivitas) menurut (Arens, 2011) pengendalian berperan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menjamin bahwa *risk response* terlaksana dengan efektif dan tujuan pengendalian pihak manajemen dapat tercapai.

Informasi dan komunikasi merupakan sistem informasi yang merupakan serangkaian prosedur yang formal dimana memproses kumpulan data dan mendistribusikannya kepada para pengguna informasi. Sistem informasi mengkonversikan input berupa transaksi dengan berbagai macam pemrosesan transaksi, baik itu keuangan maupun non keuangan.

Pemantauan Pengendalian Intern atau sering disebut dengan pengawasan, menurut Coso dalam (Arens, 2011) adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern.

Melalui pengawasan dilakukan secara periodik, maka manajemen dapat memastikan bahwa risiko yang ada telah dapat dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima oleh manajemen serta untuk melihat mitigasi yang dilakukan telah berjalan sesuai keinginan perusahaan atau masih perlu untuk ditingkatkan agar sesuai dengan perubahan lingkungan melalui supervisi yang efektif, pelaporan dan audit internal.

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Dampak *Accrual Basic* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**. Variabel *Accrual Basic* yang diproyeksikan dengan penerapan SAP berbasis akrual, komitmen organisasi, sumber daya manusia (SDM), teknologi dan informasi, dan variabel SPIP yang diproyeksikan dengan sistem pengendalian Intern Pemerintah, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

STUDI LITERATUR

Pengaruh SAP Berbasis Akrual Terhadap AKIP

Penelitian yang dilakukan (Erawati, Teguh, Kurniawan, & Danang, 2018), dan (Darma, 2019) menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dari hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

HI : Penerapan SAP Berbasis Akrual Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap AKIP

Komitmen organisasi sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. (Darma, 2019) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi.

Penelitian (Jantong, Nurkholis , & Roekhudin, 2018) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan menurut hasil penelitian (Intan Pratiwi, Rahayu, & Zutilisna, 2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap AKIP. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap AKIP

Semangki kuat pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, semangkin kuat daya saing dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya (Jantong, Nurkholis , & Roekhudin, 2018). Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan baik.

(Ajhar & Pituringsih, 2015) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan factor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (Jantong, Nurkholis , & Roekhudin, 2018) hasil penelitiannya menjelaskan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia.

Hasil penelitian (Intan Pratiwi, Rahayu, & Zutilisna, 2017), (Jantong, Nurkholis , & Roekhudin, 2018), dan (Erawati, Teguh, Kurniawan, & Danang, 2018) bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP dari hasil penelitian tersebut penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sumber Daya Manusia (SDM) Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap AKIP

Teknologi informasi yang terintegrasi dan mudah digunakan, juga mampu mengolah dan menyediakan data yang akurat dan terkini dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Menurut (Ajhar & Pituringsih, 2015) pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa

teknologi informasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan penelitian (Intan Pratiwi, Rahayu, & Zutilisna, 2017) dan (Erawati, Teguh, Kurniawan, & Danang, 2018) menyatakan bahwa Teknologi dan Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP dari hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Teknologi dan Informasi Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap AKIP

Lingkungan Pengendalian menurut COSO dalam (Arens, 2011) terdiri dari filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, penugasan wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia dan praktek. Penelitian (Mujannah, Artinah, & Safriansyah, 2019) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian tidak berpengaruh positif terhadap AKIP, dari hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Lingkungan Pengendalian Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap AKIP

Penilaian Risiko menurut (Arens, 2011) menjelaskan bahwa penilaian risiko akan menilai sejauh mana dampak dari suatu kejadian dapat mengganggu pencapaian dari tujuan perusahaan. Perusahaan harus dapat mengelola risiko yang dihadapinya. Selain dapat mengelola dan melakukan penilaian terhadap risiko perusahaan harus dapat menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko tersebut dengan baik.

Penelitian (Mujannah, Artinah, & Safriansyah, 2019) menyatakan bahwa penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap AKIP, dari hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Penilaian Risiko Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap AKIP

(Arens, 2011) membagi kegiatan pengendalian kedalam lima kelompok yaitu: Pemisahan tugas yang jelas, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengecekan independen atas pelaksanaan, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.

Kegiatan Pengendalian Intern, yaitu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi. Berdasarkan penelitian (Mujannah, Artinah, & Safriansyah, 2019) menyatakan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap AKIP, dari hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H7 : Kegiatan Pengendalian Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap AKIP

Komunikasi yaitu pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing individu. Komunikasi harus berjalan secara efektif baik dari struktur organisasi paling atas ke jenjang manajemen organisasi ke bawah. Hal ini memungkinkan karyawan untuk mendapatkan dan menukar informasi yang diperlukan agar dapat melaksanakan, mengelola dan mengendalikan proses bisnis perusahaan.

Fajar (2016) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan AKIP, sedangkan menurut hasil penelitian (Mujannah, Artinah, & Safriansyah, 2019) menyatakan bahwa informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap AKIP. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H8 : Informasi dan Komunikasi Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

Pengawasan Terhadap AKIP

Pemantauan Pengendalian Intern atau sering disebut dengan pengawasan, menurut Coso dalam (Arens, 2011) adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern. Pemantauan pengendalian intern atau pengawasan, harus dapat menilai kualitas kinerja dari

waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. (Mujannah, Artinah, & Safriansyah, 2019) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dari hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H9 : Pengawasan Berpengaruh Positif Terhadap AKIP

METODE

Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penulis mencoba untuk menjelaskan, meringkaskan kondisi-kondisi objek dan variabel signifikan yang ditemui pada saat penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan kuesioner dengan pihak terkait di instansi pemerintahan yaitu Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin. Data Sekunder yang diperoleh dengan mencari teori-teori dan ide-ide pokok pikiran dari buku, literatur, artikel, laporan keuangan, dan jurnal yang terkait. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data dengan menggunakan data kuantitatif statistik melalui alat uji regresi SPSS 24.0. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan.

Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah pegawai kesbangpol, yaitu sebanyak 47 orang. Dalam menentukan besarnya sampel, peneliti menggunakan

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \epsilon$$

rumus Slovin (Amirin, 2011) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dimana: n = ukuran sampel
N = ukuran Populasi
e = toleransi ketidaktelitian (dalam persen)

Penelitian ini bersifat sosial, sehingga toleransi ketidaktelitian/ taraf kesalahan ditetapkan 10%. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa tingkat ketelitian berbeda-beda menurut tujuan atau jenis penelitiannya, untuk bidang sosial ditolerir sampai 5% atau 10%. Berdasarkan rumus diatas maka ditentukan jumlah besar sampel:

$$n = \frac{47}{1 + 47 (0,1^2)}$$

$$n = 32 \text{ sampel}$$

Peneliti memperoleh jumlah sampel diperoleh sebanyak 32 orang responden. Penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Metode *simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel.

Pengujian data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu suatu metode yang menganalisa pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2014:279). Rumus yang dipakai dalam analisa **Regresi Linier Berganda** adalah sebagai berikut:

HASIL

Uji Validitas

Peneliti menggunakan uji validitas melalui teknik *r pearson* atau koefisien korelasi *pearson product moment* dengan taraf signifikansi 5%. Item pernyataan dikatakan valid apabila item tersebut memiliki koefisien korelasi sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3) (Sugiyono, 2014). Hasil uji coba kepada 32 orang responden, berikut disajikan rekapitulasi hasil perhitungan validitas tiap-tiap item Nilai *r* tabel dengan $n = 32$ pada signifikansi 5%, ditemukan nilai *r* tabel sebesar 0,349 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada instrumen penelitian yang digunakan memiliki angka nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel. Ini berarti semua item pernyataan tersebut valid.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Jumlah Item	Koefesien Korelasi	Keterangan
1	<i>Accrual Basic</i>	6	0,909	Valid
2	Komitmen Organisasi	3	0,892	Valid
3	Sumber Daya Manusia	2	0,901	Valid
4	Teknologi Informasi	4	0,848	Valid
5	Lingkungan Pengendalian	6	0,904	Valid
6	Manajemen Risiko	4	0,552	Valid
7	Kegiatan Pengendalian	3	0,500	Valid
8	Informasi dan Komunikasi	3	0,761	Valid
9	Pengawasan	7	0,500	Valid
10	AKIP	8	0,477	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Uji Reliabilitas

Peneliti menggunakan uji reliabilitas dalam mendapatkan tingkat ketepatan, keterandalan alat pengumpul data (instrumen) yang digunakan (Sugiyono, 2014). Instrumen penelitian yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2014).

Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. Kriteria penilaian reliabilitas adalah apabila hasil koefisien reliabilitas minimal 0,6, instrumen penelitian tersebut reliabel (Sugiyono, 2014). Berikut ini disajikan rekapitulasi hasil perhitungan reliabilitas instrumen.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	<i>Accrual Basic</i>	1	0,846	Reliabel
2	Sistem Pengendalian Internal	8	0,850	Reliabel
3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	0,889	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Uji Normalitas

Peneliti menggunakan uji normalitas dalam menentukan model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, dengan menggunakan analisis uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik (Ghozali, 2015).

Tabel 1.3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,0000000
Most Extreme Differences	Absolute	0,280
	Positive	0,280
	Negative	-0,263
Test Statistic		0,280
Asymp. Sig. (2-tailed)		.300 ^c

Sumber: Data diolah SPSS 24, 2022

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *one-samplekolmogorof-smirnov* pada tabel 1.3, menunjukkan bahwa nilai statistic 0.280 atau nilai sig 0.30 atau 30% lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$.

Uji Multikolinieritas

Peneliti menggunakan uji multikolinieritas menguji apakah model regresi yang dihasilkan terdapat adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2015). Kita dapat mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi, dilihat dari *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* masing-masing varibel dependen, jika $VIF < 10$ dan *Tolerance* $> 0,10$ maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 1.4 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
(Constant)		
Penerapan SAP Akrua Basis	0,134	7,457
Komitmen Organisasi	0,35	2,855
SDM	0,315	3,171
Teknologi Informasi	0,547	1,827
Lingkungan Pengendalian	0,594	1,684
Penilaian Risiko	0,754	1,327
Kegiatan Pengendalian	0,181	5,531
Informasi dan Komunikasi	0,12	8,346
Pengawasan	0,192	5,206

Heterokedastisitas

Peneliti menggunakan uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi yang dihasilkan memiliki ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Sugiyono, 2014). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu meregresi masing-masing

variabel independen dengan *absolute residual* sebagai variabel dependen. Uji *Glejser* yang telah dilakukan dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai *absolute Residual* (ABS_RES). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (tidak ada heteroskedastisitas).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 1.5
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	10,790	9	1,199	1,260	0.0312 ^b
Residual	20,928	22	0,951		
Total	31,719	31			

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji kelayakan model atau yang lebih populer disebut sebagai uji F. Uji F (Uji simultan model) merupakan tahap awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Model yang diestimasi layak berarti model tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} pada tingkat kepercayaan $\alpha = 0,05$ atau nilai probabilitas F_{hitung} (*sig*) memiliki nilai lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tersebut layak (Ghozali, 2015).

Uji Hipotesis (Uji t)

Penelitian ini menguji sembilan hipotesis yang semuanya merupakan hipotesis parsial. Sehingga pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t. Uji t dalam regresi berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi model regresi berganda, apakah sudah merupakan parameter yang tepat atau belum (Sugiyono, 2014). Pengujian hipotesis (uji parsial) dilakukan dengan menggunakan uji-t yang dilakukan untuk mengetahui variabel bebas signifikan atau tidak terhadap model regresi. Uji-t ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (*sig.*) di bawah 0,05 atau membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} yang ditunjukkan oleh $df = 32$ dengan tingkat kepercayaan (*sig.*) $\alpha = 5\%$ adalah 2,036.

Tabel 1.6. Kesimpulan Uji Hipotesis

Hipotesis	Probabilitas (Sig)	Perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}	Kesimpulan
H1: Perencanaan SAP berbasis akrual (+) Signifikan	0,044 < 0,05	2,031 < 2,036	Diterima
H2: Komitmen Organisasi (-) tidak Signifikan	0,060 > 0,05	-0,039 < 2,036	Ditolak
H3 : Sumber Daya Manusia (+) Signifikan	0,018 < 0,05	0,415 < 2,036	Diterima
H4: Teknologi Informasi (+) tidak Signifikan	0,671 > 0,05	0,431 < 2,036	Ditolak
H5 : Lingkungan Pengendalian (+) tidak Signifikan	0,282 > 0,05	-1,102 < 2,036	Ditolak

H6 : Manajemen resiko (+) Signifikan	0,017 < 0,05	1,790 < 2,036	Diterima
Kegiatan Pengendalian (-) Signifikan	0,876 < 0,05	-0,157 < 2,036	Ditolak
Informasi dan Komunikasi (-) Signifikan	0,063 > 0,05	-1,960 < 2,036	Ditolak
Pengawasan (+) Signifikan	0,049 < 0,05	0,593 < 2,036	Diterima

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Analisis Regresi Berganda

Rekapitulasi hasil uji regresi berganda dapat dilihat dengan jelas pada Tabel 1.7 sebagai berikut.

Tabel 1.7
Rekapitulasi Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel Bebas (X)	Koefisien Regresi	Koefisien Beta	t hitung	Probabilitas (Sig.)
Accrual Basic (X1)	1,049	1,011	2,139	0,044
Komitmen Organisasi (X2)	-0,009	-0,012	-0,039	0,060
SDM (X3)	0,108	0,128	0,415	0,018
Teknologi Informasi (X4)	0,046	0,101	0,431	0,671
Lingkungan Pengendalian (X5)	-0,175	-0,248	-1,102	0,282
Manajemen Resiko (X6)	0,254	0,357	1,790	0,017
Kegiatan Pengendalian (X7)	-0,081	-0,064	-0,157	0,876
Informasi dan Komunikasi (X8)	-1,008	-0,981	-1,960	0,063
Pengawasan (X9)	0,318	0,234	0,593	0,049
Konstanta	31,615			
F Hitung	9,879			
R	0,583			
R²	0,840			
Adjusted R²	0,070			
Sig. F	0,036			
SEE	0,975			

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Persamaan yang dapat dibentuk dari pengaruh variabel Penerapan SAP berbasis Akruar (X1), Komitmen Organisasi (X3), SDM (X4), Teknologi Informasi (X6), Lingkungan Pengendalian (X5), Manajemen Risiko (X6), Lingkungan Pengendalian (X7), Informasi dan komunikasi (X8), dan Pengawasan (X10) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebagai berikut.

$$Y = 31,615 + 1,049 X_1 + (-0,009) X_2 + 0,108 X_3 + 0,046 X_4 + (-0,175) X_5 + (0,254)X_6 + (-0,081)X_7 + (-1,008) X_8 + 0,318X_9$$

PEMBAHASAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *Accrual Basic* memiliki pengaruh signifikan terhadap AKIP di Kesbangpol Banjarmasin. Hal ini dibuktikan secara statistik nilai t_{hitung} (2,031) < t_{tabel} 2,036 dan nilai signifikansi $0,044 < 0,05$ sehingga menunjukkan bahwa penerapan *Accrual Basic* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan *Accrual Basic* yang dilakukan semakin baik atau besar, maka akan sebanding dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh (Ajhar & Pituringsih, 2015) dan (Erawati, Teguh, Kurniawan, & Danang, 2018) yang menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap AKIP.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap AKIP di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Berdasarkan hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap AKIP di Kesbangpol Banjarmasin. Hal ini dibuktikan secara statistik nilai t_{hitung} (-0,039) < t_{tabel} 2,036 dan nilai signifikansi $0,060 > 0,05$. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian (Jantong, Nurkholis, & Roekhudin, 2018) namun konsisten dengan hasil penelitian (Intan Pratiwi, Rahayu, & Zutilisna, 2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap AKIP.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variable Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap AKIP di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Berdasarkan hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , diperoleh hasil secara statistik nilai t_{hitung} 0,415 < t_{tabel} 2,036 dan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ artinya bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah diteliti oleh (Jantong, Nurkholis, & Roekhudin, 2018) dan (Intan Pratiwi, Rahayu, & Zutilisna, 2017) yang menyatakan bahwa SDM berpengaruh terhadap AKIP dan bertentangan dengan hasil penelitian (Ajhar & Pituringsih, 2015). Sumber daya manusia di Kesbangpol Banjarmasin sudah berjalan sebagaimana mestinya sehingga mampu meningkatkan AKIP.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap AKIP di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Berdasarkan hasil teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap AKIP di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , diperoleh hasil secara statistik nilai t_{hitung} (0,431) < t_{tabel} 2,036 dan nilai signifikansi $0,671 > 0,05$. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian (Intan Pratiwi, Rahayu, & Zutilisna, 2017) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap AKIP namun konsisten dengan hasil penelitian (Ajhar & Pituringsih, 2015) yang menyatakan bahwa TI tidak berpengaruh terhadap AKIP. Dengan demikian penerapan teknologi informasi tidak mampu meningkatkan AKIP.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap AKIP di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Berdasarkan hasil pengujian lingkungan pengendalian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap AKIP di Kesbangpol Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , diperoleh hasil secara statistik nilai t_{hitung} (-1,102) < t_{tabel} 2,036 dan nilai signifikansi $0,282 > 0,05$. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian (Mujannah, Artinah, & Safriansyah, 2019) yang menyatakan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap AKIP. Melalui pengendalian intern yang baik, manajemen perusahaan dapat mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kesbangpol Banjarmasin harus lebih meningkatkan peran lingkungan pengendalian dalam meningkatkan AKIP.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penilaian risiko memiliki pengaruh terhadap AKIP di Kesbangpol Banjarmasin. Dari hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , diperoleh hasil secara statistik nilai t_{hitung} 1,790 < t_{tabel} 2,036 dan nilai signifikansi $0,017 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap AKIP di Kesbangpol Banjarmasin. Hal ini bertentangan dengan penelitian (Mujannah, Artinah, & Safriansyah, 2019). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kesbangpol Banjarmasin sudah mampu meminimalkan terjadi

risiko di Badan Kesbangpol Banjarmasin dalam mencapai AKIP yang transparan dan bertanggung jawab.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap AKIP di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Hal ini dibuktikan hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{table} , diperoleh hasil secara statistik nilai $t_{hitung} (-0,157) < t_{table} 2,036$ dan nilai signifikansi $0,876 > 0,05$. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian (Mujannah, Artinah, & Safriansyah, 2019) yang menyatakan bahwa Aktivitas Pengendalian yang merupakan unsur SPI berpengaruh terhadap AKIP. Hasil penelitian Badan Kesbangpol Banjarmasin belum sepenuhnya menjalankan kegiatan pengendalian yang baik terhadap AKIP.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi tidak memiliki pengaruh terhadap AKIP di Kesbangpol Banjarmasin. Hal ini dibuktikan dengan hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{table} , diperoleh hasil secara statistik nilai $t_{hitung} (-1,960) > t_{table} 2,036$ dan nilai signifikansi $0,063 > 0,05$. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian (Mujannah, Artinah, & Safriansyah, 2019) yang menyatakan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap Informasi dan komunikasi di Kesbangpol Banjarmasin belum berjalan secara efektif dalam menyediakan kemudahan atas akses informasi dan komunikasi di Kesbangpol Banjarmasin.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengawasan memiliki pengaruh signifikan terhadap AKIP di Kesbangpol Banjarmasin. Berdasarkan hasil perbandingan t_{hitung} dengan t_{table} , diperoleh hasil secara statistik nilai $t_{hitung} 0,593 < t_{table} 2,036$ dan nilai signifikansi $0,049 < 0,05$. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Mujannah, Artinah, & Safriansyah, 2019) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap AKIP. Badan Kesbangpol Banjarmasin telah melaksanakan pengawasan dengan baik sehingga hal ini mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji regresi berganda, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kesbangpol Banjarmasin Kalimantan Selatan. Komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kesbangpol Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi di Badan Kesbangpol Banjarmasin Kalimantan Selatan. Teknologi Informasi kinerja berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Lingkungan pengendalian tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Manajemen risiko mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Kegiatan pengendalian tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Informasi dan komunikasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Kesbangpol Banjarmasin.

Saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak pada Badan Kesbangpol Banjarmasin dalam hal meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yaitu sebaiknya Badan Kesbangpol Banjarmasin memberikan dukungan yang nyata dan penuh melalui penerapan *Accrual Basic*. Dengan *Accrual Basic* yang baik diharapkan mampu memberikan tanggung jawab dan pelayanan yang lebih baik lagi dalam tuntutan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah khususnya di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Saran yang kedua yaitu menerapkan kebijakan terkait efektivitas dalam lingkungan pengendalian diantaranya memperkuat komitmen organisasi dan nilai etika, dan peningkatan teknologi informasi yang lebih baik lagi kedepannya diiringi dengan keterbukaan dan komunikasi yang intens. Dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik maka akan memudahkan proses bisnis, pemahaman yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab, sehingga proses kerja pegawai di Kesbangpol Banjarmasin akan berjalan lancar.

REFERENSI

- Ajhar, A., & Pituringsih, E. (2015, Januari). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI dan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 62-73.
- Amirin, T. (2011). Populasi dan Sampel Penelitian 4. In Slovin, *Ukuran Sampel Rumus Slovin*. Jakarta: Erlangga.
- Arens, A. (2011). *Auditing and Assurance Service, An Integrated Approach (13th ed)*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Darma, S. (2019). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI di Kota Tanjungbalai. *Ekonomi dan Bisnis*.
- Erawati, Teguh, Kurniawan, & Danang. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI: Kajian dari Aspek Keperilakuan. *Journal Ekonomi dan Bisnis*, 21, 313-332.
- Ghozali, I. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi 4*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Intan Pratiwi, A., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI. *Jurnal Riset Akutansi Kontemporer (JRAK)*, 5(2), 7-11.
- Jantong, A., Nurkholis , & Roekhudin. (2018). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Standar AKuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemeritnah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(20), 1-169.
- Mujannah, M., Artinah, B., & Safriansyah, S. (2019). The Effect of Performance Based Budgeting and Internal Control Systems on Performance Accountability of Government Agencies : A Case Study in Banjarbaru City Inspectorates. *Journal Of Economic Info (JEI)*, 6(3), 7-15. doi:DOI:10.31580/jei.v6i3.924
- PERPRES No 8. (2006, Maret 20). Retrieved from DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41947/perpres-no-8-tahun-2006>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1. (2004, Januari 14). *peraturan.bpk.go.id*. Retrieved from DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%201%20tahun,Republik%20Indonesia%20Tahun%201968%20Nomor>
- Undang-Undang Nomor 17 . (2003, April 5). *DATABASE PERATURAN*. Retrieved from Peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>